

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Tiara Anjely Rumpaidus

NPP: 32.1086

*Asdaf Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [32.1086@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1086@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si

## ABTRACT

**Problem/Background (GAP):** Extreme poverty remains a major challenge in Nduga Regency, Mountainous Papua Province, with the lowest Human Development Index in Indonesia and complex geographical and security conditions. **Purpose:** This study aims to understand and analyze the implementation of social assistance policies in accelerating poverty reduction in Nduga Regency. **Methods:** This research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants totaled 12 people consisting of policy implementers (local government officials) and beneficiaries (the community). Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** the policy interpretation process has accommodated local wisdom and participatory socialization communication, but is still constrained by limited access, infrastructure, and security conditions. The implementing organization involves crosssectoral coordination, but SOPs and resource management are not optimal. The implementation of social assistance programs still faces constraints on the validity of recipient data and armed conflict. **Conclusion:** The implementation of poverty reduction policies in Nduga Regency requires an asymmetric and adaptive approach, accommodating local characteristics, and strengthening collaboration between the government, customary institutions, and the community. The main recommendations include improving the beneficiary data validation system, strengthening coordination, developing infrastructure, and implementing a collaborative approach to increase the effectiveness and sustainability of poverty reduction programs in remote areas.

**Keywords:** Policy Implementation, Poverty, Nduga Regency, Papua Mountains, Social Assistance, Indigenous Peoples

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Indonesia dan kondisi geografis serta keamanan yang kompleks. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga. **Motode:** Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari pelaksana kebijakan (pejabat pemerintah daerah) dan penerima manfaat (masyarakat). Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses interpretasi kebijakan telah mengakomodir kearifan lokal dan komunikasi sosialisasi partisipatif, namun terkendala oleh keterbatasan akses, infrastruktur, dan kondisi keamanan. Organisasi pelaksana melibatkan koordinasi lintas sektoral, namun SOP dan pengelolaan sumber daya belum optimal. Pada dimensi aplikasi bahwa pelaksanaan program bantuan sosial masih menghadapi kendala validitas data penerima dan konflik bersenjata. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga masih belum berjalan dengan baik. Saran penelitian yakni perlunya pendekatan yang asimetris dan adaptif, mengakomodasi karakteristik lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan perbaikan sistem validasi data penerima bantuan, penguatan koordinasi, pengembangan infrastruktur, dan penerapan pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penanganan kemiskinan di daerah terpencil.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Bantuan Sosial, Masyarakat Adat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman geografis, sosial, dan budaya yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan perhatian khusus, khususnya di wilayah Indonesia Timur. (Ginting & Nawawi 2022) menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu program saja, melainkan memerlukan berbagai program dan upaya yang terintegrasi dalam menangani kemiskinan (Ginting & Nawawi, 2022).

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, Provinsi Papua Pegunungan menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase kemiskinan mencapai 26,03 persen per Maret 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Pegunungan, 2023). Kondisi ini menjadi paradoks mengingat Papua Pegunungan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan telah menerima Dana Otonomi Khusus selama lebih dari 20 tahun. Kebijakan Otonomi Khusus yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 seharusnya mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Sejalan dengan temuan (Fossati, 2016), sejak desentralisasi pada tahun 2001, pemerintah daerah Indonesia telah memperoleh peran kunci dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan sosial,

namun sejauh mana mereka mampu memenuhi tantangan tersebut masih menjadi perdebatan.

Kabupaten Nduga, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, menunjukkan kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Kabupaten yang dibentuk pada tahun 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya ini memiliki karakteristik unik sebagai daerah pegunungan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat dengan budaya dan tradisi yang khas. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Nduga memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, yaitu sebesar 34,10 pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,91 (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menempatkan Nduga sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Papua Pegunungan setelah Kabupaten Lanny Jaya, dengan persentase penduduk miskin mencapai 47,61 persen pada tahun 2022. (Loi, dkk 2022) menjelaskan bahwa kemiskinan telah menjadi masalah selama bertahun-tahun di banyak negara berkembang, dan dampak institusi terhadap pengurangan kemiskinan multidimensional memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nduga tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga diperparah oleh kondisi geografis yang terpencil, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tantangan keamanan yang tidak stabil. Sebanyak 63,61 persen dari total 1.021 keluarga di Nduga berada dalam kategori prasejahtera, dengan hanya kurang dari satu persen keluarga yang termasuk dalam kategori Sejahtera II dan III. Kondisi ini diperparah oleh dampak konflik bersenjata yang menyebabkan 3.397 pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA terpaksa tidak bersekolah karena harus mengungsi, serta terganggunya penyaluran dana desa di 19 kampung hingga bulan Juli 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nduga, 2023). Hirai dan Hiyane (2021) mengidentifikasi bahwa intervensi komprehensif untuk anak-anak, keluarga, dan komunitas yang berfokus pada perencanaan karir dan kehidupan anak menjadi faktor krusial dalam memutus siklus kemiskinan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nduga, termasuk program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah Kabupaten Nduga juga telah meluncurkan enam program prioritas yang mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penanganan stunting. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari masalah validitas data penerima bantuan, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, hingga kendala geografis dan keamanan yang menghambat distribusi bantuan. (Asri, 2019) menekankan bahwa kesulitan dalam mengidentifikasi masyarakat miskin seringkali mendorong alokasi manfaat yang universal, namun hal ini dapat menimbulkan masalah eksklusi dan inklusi yang tinggi. Meskipun berbagai kebijakan publik telah diarahkan untuk pengurangan kemiskinan, penurunan jumlah orang miskin tidak berbanding lurus dengan upaya yang dilakukan, sehingga menimbulkan masalah sosial baru. Penelitian mereka menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan sumber daya yang melimpah, melainkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama ini belum mampu mengatasi masalah mendasar. Hal ini sejalan dengan temuan (Liu & Lin, 2018) yang mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam proses implementasi kebijakan eliminasi kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk keterbatasan kondisi objektif dan redefinisi tujuan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasi kebijakan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Jamil, dkk. (2021) menegaskan bahwa tata kelola yang kuat diperlukan untuk pengurangan kemiskinan dan ketepatan waktu implementasi kebijakan lebih mungkin untuk mengurangi kemiskinan. (Tsai & Liao, 2020) mengidentifikasi pentingnya mobilisasi insentif kader dalam implementasi kebijakan melalui mekanisme kelompok pimpinan lintas sistem, manajemen personel/keuangan lintas tingkat, dan pendampingan. Dalam konteks penanganan kemiskinan di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Nduga, diperlukan pemahaman mendalam tentang proses implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lokal, budaya masyarakat, dan tantangan-tantangan unik yang dihadapi. Mulianingsih (2022) menekankan bahwa desa memiliki keberdayaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat desa, serta mengatasi kemiskinan yang berada di desa melalui pengelolaan yang baik dan profesional. Analisis implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk memahami mengapa program-program yang telah dirancang dengan baik seringkali tidak memberikan hasil yang optimal di lapangan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga menghadapi berbagai masalah kompleks yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Masalah pertama yang menjadi perhatian adalah kondisi kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat Nduga, dimana Kabupaten ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia sebesar 34,10 pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,91.

Masalah kedua berkaitan dengan kondisi geografis dan keamanan yang menjadi tantangan unik dalam implementasi kebijakan. Masalah ketiga adalah rendahnya kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan. Masalah keempat berkaitan dengan masalah operasional dalam implementasi program bantuan sosial. Masalah kelima adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program. Masalah keenam adalah disparitas sosial ekonomi yang sangat tinggi, dimana 63,61 persen dari total 1.021 keluarga di Nduga berada dalam kategori prasejahtera, dengan hanya kurang dari satu persen keluarga yang termasuk dalam kategori Sejahtera II dan III.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, teridentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Kabupaten Nduga telah menerima Dana Otonomi Khusus selama lebih dari 20 tahun dan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT, namun kondisi kemiskinan masyarakat masih berada pada level ekstrem. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan dan penanganan kemiskinan. Penelitian oleh Alba (2018) dengan judul “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)” menemukan bahwa Bantuan Sosial

rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup menaati peraturan dan tidak menerima bantuan secara utuh. Penelitian oleh (Anggreni dan Subanda, 2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Buleleng” menemukan bahwa implementasi yang dimaksud telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial masyarakat di Kabupaten Buleleng. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi, alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan struktur birokrasi yang kurang mendukung menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Penelitian oleh (Ma'ruf, 2022) dengan judul “*Implementation of the poverty reduction acceleration policy in Karawang Regency, Indonesia*” menemukan bahwa dampak penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan penambahan infrastruktur pendidikan, perluasan akses pendidikan, pendidikan berkualitas, peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan harapan lama sekolah, dan peningkatan angka melek huruf. Tingkat perubahan dalam implementasi kebijakan meliputi penurunan jumlah guru SD dan SMP yang bergelar SMA atau D3 dan jumlah putus sekolah, peningkatan angka partisipasi siswa, dan penurunan jumlah penduduk miskin.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kebaharuan ilmiah yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam beberapa aspek fundamental. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Alba (2018), Anggreni dan Subanda (2020), dan Ma'ruf (2022) yang banyak memfokuskan pada daerah perkotaan atau daerah dengan tingkat aksesibilitas dan infrastruktur yang relatif baik, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan daerah dengan karakteristik geografis terpencil, masyarakat adat, dan tantangan keamanan yang unik.

Dari segi konteks kebijakan dan karakteristik objek penelitian, penelitian ini berbeda dengan studi-studi terdahulu yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara (Alba, 2018), Kabupaten Buleleng (Anggreni & Subanda, 2020) dan Kabupaten Karawang (Ma'ruf, 2022). Kabupaten Nduga memiliki keunikan sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia (34,10) dan tingkat kemiskinan tertinggi, serta menghadapi tantangan konflik keamanan yang berdampak pada implementasi kebijakan. Kondisi ini sangat berbeda dengan lokus penelitian terdahulu yang umumnya berada di daerah dengan tingkat pembangunan dan keamanan yang relatif stabil.

Dari aspek teori dan metode penelitian, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) dengan tiga dimensi analisis yaitu

Interpretasi, Organisasi, dan Aplikasi, yang berbeda dengan pendekatan teoritis yang digunakan penelitian sebelumnya. Alba (2018) lebih fokus pada aspek penyimpangan dan akurasi data, Anggreni dan Subanda (2020) menekankan pada prosedur dan akuntansi pemerintahan sedangkan Ma'ruf (2022) menggunakan pendekatan dampak kebijakan terhadap sektor pendidikan. Penelitian ini secara komprehensif menganalisis proses implementasi dari tahap interpretasi kebijakan hingga aplikasi di lapangan dengan mempertimbangkan dinamika lokal yang kompleks.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nduga.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam kompleksitas implementasi kebijakan di daerah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya yang unik seperti Nduga. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, yang sangat sesuai untuk memahami proses implementasi kebijakan yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor dan faktor lingkungan. Kondisi Kabupaten Nduga yang terpencil dan memiliki karakteristik budaya masyarakat adat yang kuat memerlukan pendekatan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Simangunsong (2017) bahwa penelitian kualitatif memiliki desain yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi objektif di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Nduga selama dua minggu dari tanggal 13-22 Januari 2025, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan IPM terendah sebesar 34,10 pada tahun 2022.

Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan total 12 orang yang terdiri dari kepala bidang dinas bantuan sosial, informan utama (Kepala Bidang Dinas Kependudukan, Kepala Distrik/Camat, Kepala Kampung/Desa), dan informan pendukung (petani, ibu rumah tangga, anak yang tidak bersekolah) untuk memberikan perspektif komprehensif dari sisi pembuat kebijakan hingga penerima manfaat. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dimana wawancara mendalam dipilih sebagai teknik utama karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang komprehensif tentang implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996) yang mencakup dimensi interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Nurdin & Hartati (2019) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dimana pada tahap reduksi data peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data sesuai dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang diorganisir berdasarkan ketiga dimensi teori Charles O. Jones (1996), dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan verifikasi melalui *member checking* untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti. Menurut Nurdin & Hartati

(2019), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara tepat, yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di daerah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Nduga.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (1996). Teori ini mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam implementasi kebijakan, yaitu Interpretasi (Interpretation), Organisasi (Organization), dan Aplikasi (Application). Dimensi interpretasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dipahami dan diterjemahkan oleh para pelaksana, dimensi organisasi mencakup struktur kelembagaan dan koordinasi antar instansi yang terlibat, sedangkan dimensi aplikasi mengacu pada pelaksanaan program secara operasional dan pencapaian tujuan kebijakan. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di daerah yang memiliki tantangan khusus seperti Kabupaten Nduga. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

#### **3.1 Interpretasi**

##### **1. Interpretasi Penjabaran Kebijakan**

Interpretasi penjabaran kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga merupakan proses memahami dan menguraikan kebijakan secara lebih rinci agar dapat diimplementasikan secara praktis dan operasional. Kebijakan penanganan kemiskinan di kabupaten ini diarahkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program-program yang menysasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Proses interpretasi ini mencakup pemahaman terhadap arah kebijakan nasional dan daerah, kemudian menguraikannya menjadi langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Nduga. Penjabaran kebijakan dilakukan melalui lima tahapan sistematis, yaitu: pertama, pemetaan masalah kemiskinan secara spesifik dengan mengidentifikasi karakteristik kemiskinan lokal seperti keterisolasian wilayah, rendahnya akses layanan dasar, serta ketergantungan ekonomi pada sektor informal. Kedua, pengembangan program berbasis kearifan lokal melalui perancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan memperhatikan potensi lokal seperti pertanian subsisten, kerajinan lokal, atau ternak. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan akses layanan publik yang fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dasar, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Keempat, sinergi antar-instansi dan lembaga adat dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, LSM, dan tokoh adat guna memastikan program berjalan sesuai konteks lokal. Kelima, monitoring dan evaluasi berbasis data lokal dengan menggunakan data lokal yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi efektivitas program.

##### **2. Interpretasi Komunikasi Sosialisasi**

Interpretasi komunikasi sosialisasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga memiliki peran sentral dalam menjembatani antara pemerintah sebagai

pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks daerah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya seperti Nduga, proses sosialisasi tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Proses komunikasi sosialisasi dilakukan melalui empat pendekatan utama. Pertama, penerjemahan bahasa kebijakan ke bahasa masyarakat, di mana informasi kebijakan disampaikan dalam bahasa lokal atau disesuaikan dengan budaya masyarakat. Hal ini sangat penting agar pesan bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan pendidikan formal. Kedua, pemanfaatan tokoh adat dan agama sebagai komunikator, di mana pemerintah melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan kepala kampung sebagai penyambung lidah program pemerintah. Hal ini dilakukan karena mereka memiliki pengaruh besar dan dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, pendekatan partisipatif dan dialog, di mana sosialisasi dilakukan tidak secara satu arah, tetapi membuka ruang diskusi agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kritik atau masukan. Keempat, penggunaan media tradisional dan pertemuan komunal, di mana karena keterbatasan akses teknologi, sosialisasi lebih efektif dilakukan melalui pertemuan kampung, acara adat, atau media tradisional seperti pengeras suara desa dan radio lokal. Pendekatan komunikasi sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara bersama-sama.

### **3.2 Organization**

#### **1. Struktur Pelaksana Kebijakan**

Organisasi pelaksana kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga melibatkan struktur kelembagaan yang kompleks dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga, Bapak Jhon Karel, S.STP., M.Si, implementasi kebijakan penanganan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanggulangan Bantuan Sosial dan Kepala Bidang Dinas Kependudukan yang turut langsung untuk mengawasi atau melihat program kerja ini. Struktur organisasi pelaksana juga melibatkan kerjasama lintas sektoral yang luas. Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bantuan Sosial, Bapak Jianto, S.E., beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan meliputi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Kependudukan, Ibu Ratu Maripadang, S.E., dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan terdapat kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Struktur organisasi ini menunjukkan pendekatan holistik dalam penanganan kemiskinan yang tidak hanya fokus pada aspek sosial, tetapi juga aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2. Organisasi Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Organisasi penetapan SOP dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga melibatkan sejumlah organisasi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Struktur organisasi ini terdiri dari tiga level utama dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pada level tertinggi, Bupati Kabupaten Nduga sebagai kepala daerah memiliki kewenangan

untuk mengesahkan SOP penanganan kemiskinan yang dirancang oleh perangkat daerah. Bupati juga menetapkan arah kebijakan strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kondisi lokal. Di level perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan dalam merumuskan rencana strategis penanggulangan kemiskinan dan menyusun SOP berdasarkan analisis data dan kebutuhan masyarakat. Bappeda juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait. Pada level operasional, Dinas Sosial Kabupaten Nduga menjadi pelaksana teknis utama yang menangani program-program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyaluran bantuan pemerintah. Dinas Sosial juga menyusun dan menjalankan SOP operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat miskin.

### **3. Organisasi Penetapan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan**

Organisasi penetapan sumber daya keuangan dan peralatan di Kabupaten Nduga berhubungan dengan proses perencanaan, penganggaran, alokasi, dan pemantauan atas sumber daya yang digunakan untuk mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga melalui berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertanggung jawab dalam penetapan dan pengelolaan sumber daya ini. Pemkab Nduga telah meluncurkan enam program prioritas utama yang mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penanganan stunting, yang dikemas dalam pelayanan satu pintu secara terpadu untuk efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan sumber daya. Dalam pelaksanaan program ini, pendataan penduduk menjadi kunci, dilakukan oleh Dukcapil dan Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan memiliki dokumen resmi seperti Kartu Keluarga dan E-KTP. Anggaran untuk program ini bersumber dari APBD Kabupaten Nduga dan didukung koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam koordinasi dan distribusi bantuan di wilayah Kabupaten Nduga yang disebabkan oleh kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur.

#### **3.3 *Application***

##### **1. Pelaksanaan Program Prioritas**

Dimensi aplikasi dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga mencakup pelaksanaan rutin berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau tujuan lain yang telah disepakati dalam kebijakan. Program aplikasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan program-program seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemkab Nduga telah meluncurkan program prioritas yang terbagi menjadi tiga program prioritas nasional dan tiga program prioritas daerah. Program prioritas nasional meliputi: pertama, mengatasi kemiskinan ekstrem; kedua, pengendalian inflasi daerah; dan ketiga, penanganan stunting dengan fokus pada gizi ibu hamil dan anak.

Sementara itu, program prioritas daerah terdiri dari: pertama, pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, E-KTP, dan akta lahir anak; kedua, pendataan pengangguran melalui pelayanan kartu kuning oleh Dinas Sosial; dan ketiga, penyediaan jatah beras bagi masyarakat miskin setara dengan pegawai negeri sipil yaitu 40 kilogram per keluarga untuk 4 jiwa.

## **2. Implementasi Program Bantuan Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nduga, Bapak Davide Dantje, S.STP, MM., program penanganan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan program bantuan sosial ini menghadapi berbagai tantangan operasional di lapangan. Menurut Kepala Distrik Camat Kabupaten Nduga, Bapak Usman G. Wanimbo, SE, M.Si, kondisi kemiskinan di Kabupaten Nduga merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nduga tercatat sebagai yang terendah di Indonesia, yaitu 34,10, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,91. Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Nduga berada dalam kategori prasejahtera, dengan 63,61 persen dari total 1.021 keluarga. Hanya kurang dari satu persen keluarga yang termasuk dalam kategori Sejahtera II dan III. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin di Nduga mencapai 42,54 persen, dengan garis kemiskinan ditetapkan sebesar 211.691 rupiah per kapita per bulan.

## **3. Kondisi Implementasi di Lapangan**

Implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga menghadapi kompleksitas yang tinggi akibat kondisi geografis, sosial, dan keamanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung/Desa, Bapak Nehemia Gwinjange, SE., Kabupaten Nduga menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan, yang sangat diperparah oleh kondisi keamanan yang tidak stabil. Gejala keamanan ini menghambat penyaluran dana desa 19 kampung hingga bulan Juli 2022, karena aparat desa harus mengungsi, sehingga permohonan pencairan dana desa tertunda. Dampak kemiskinan multidimensi juga terlihat dari kondisi masyarakat di berbagai lapisan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani, Bapak Hermanus Kogoya, masyarakat Nduga mengalami kemiskinan yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konflik sosial dan biaya, keterbatasan akses layanan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 23,09% penduduk Nduga hidup dalam kemiskinan, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 36,73%. Kondisi kemiskinan juga berdampak pada kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan anak-anak. Berdasarkan wawancara dengan ibu rumah tangga, Ibu Netty Naap, ibu-ibu di Kabupaten Nduga banyak sekali terjebak dalam siklus kemiskinan multidimensi. Mereka menghadapi tantangan besar dalam akses pendidikan dan kesehatan, misalnya banyak anak dari ibu-ibu yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus membantu orang tua bekerja. Dampak terhadap sektor pendidikan juga sangat signifikan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anak yang belum bisa bersekolah karena kondisi ekonomi keluarga, Anita Rumaseb, di Kabupaten Nduga banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan dampak dari konflik bersenjata. Sebanyak 3.397 pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA terpaksa tidak bersekolah karena harus mengungsi akibat konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Kondisi pendidikan yang tidak optimal juga terlihat dari banyaknya sekolah yang tidak beroperasi. Banyak sekolah di Nduga termasuk 17 SD, 4 SMP, dan 1 SMA, tidak beroperasi karena situasi yang tidak aman. Anak-anak yang mengungsi sering kali belajar di sekolah darurat yang dibangun oleh relawan, namun fasilitas ini sering tidak memadai, dengan kondisi ruang kelas yang sempit dan kurangnya alat belajar. Selain itu,

banyak anak-anak yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena masalah administratif, seperti ketidakadaan kartu keluarga dan dokumen lainnya.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, menghadapi tantangan yang unik dan kompleks akibat kondisi geografis, sosial, budaya, serta keterbatasan sumber daya manusia masyarakat adat. Kebijakan pemberian bantuan sosial di Kabupaten Nduga masih belum sepenuhnya efektif karena proses seleksi penerima bantuan yang kurang selektif, administrasi yang belum tuntas, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum optimal. Selain itu, keputusan mengenai besaran dan peruntukan bantuan cenderung terpusat pada wewenang Bupati tanpa regulasi khusus yang jelas, sehingga memerlukan model implementasi kebijakan yang lebih asimetris dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Alba (2018) yang menemukan bahwa bantuan sosial rentan terhadap penyimpangan akibat tidak adanya batasan yang jelas atas belanja dana, proses pengajuan bantuan yang rumit, serta data keluarga miskin yang tidak akurat. Sama halnya dengan temuan Alba (2018), penelitian ini juga menemukan bahwa proses administrasi dan pelaporan bantuan sosial di Kabupaten Nduga masih menjadi tantangan utama, terutama karena masyarakat miskin kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan proposal yang dituntut oleh kebijakan. Namun, berbeda dengan penelitian Alba (2018) yang menekankan pada ketidakmampuan keluarga miskin dalam pembuatan proposal, di Kabupaten Nduga tantangan utama justru lebih pada keterbatasan akses, infrastruktur, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, sehingga proses administrasi seringkali tertunda atau tidak dapat dilakukan secara optimal.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Anggreni dan Subanda (2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Buleleng telah berjalan sesuai prosedur dan tujuan yang ditetapkan, serta terdapat realisasi anggaran yang jelas dan akuntabel. Berbeda dengan Kabupaten Buleleng, di Kabupaten Nduga proses realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta kondisi keamanan yang tidak mendukung. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kapasitas kelembagaan, sehingga tidak dapat disamaratakan antar daerah.

Di Kabupaten Nduga juga ditemukan adanya kendala dalam koordinasi lintas sektor, alokasi sumber daya yang tidak merata, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Namun, di Kabupaten Nduga tantangan ini diperparah oleh kondisi geografis yang terpencil dan konflik sosial yang berdampak pada penundaan penyaluran dana desa serta terganggunya pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan studi Ma'ruf (2022) yang menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan infrastruktur sebagai bagian dari strategi penanganan kemiskinan. Namun, berbeda dengan Kabupaten Karawang yang menunjukkan peningkatan akses pendidikan dan penurunan angka putus sekolah, di Kabupaten Nduga akses pendidikan masih sangat terbatas akibat banyaknya sekolah yang

tidak beroperasi dan anak-anak yang terpaksa mengungsi akibat konflik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan keamanan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di daerah-daerah dengan tantangan geografis, sosial, dan keamanan yang tinggi seperti Kabupaten Nduga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data lokal. Temuan ini juga menolak asumsi bahwa model implementasi kebijakan yang berhasil di satu daerah dapat langsung diterapkan di daerah lain tanpa memperhatikan konteks lokal. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi kebijakan yang asimetris dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya akurasi data, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa di daerah dengan tantangan khusus seperti Kabupaten Nduga, faktor keamanan, geografis, dan budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan, sehingga diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan yaitu keterbatasan sumber daya, aksesibilitas geografis, dan kurangnya validasi data penerima manfaat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta permasalahan administrasi dalam pendataan penerima bantuan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan belum berjalan secara optimal. Dari dimensi interpretasi, proses penjabaran kebijakan telah dilakukan melalui lima tahapan sistematis dan komunikasi sosialisasi menggunakan pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal, namun masih terkendala oleh keterbatasan akses dan kondisi geografis yang terpencil. Dimensi organisasi menunjukkan struktur pelaksana yang melibatkan koordinasi lintas sektoral yang luas, tetapi penetapan SOP dan pengelolaan sumber daya keuangan masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, dimensi aplikasi mengungkapkan bahwa meskipun telah diluncurkan enam program prioritas dan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT, pelaksanaannya menghadapi kendala serius berupa kondisi keamanan yang tidak stabil, konflik bersenjata yang menyebabkan ribuan anak putus sekolah, serta validitas data penerima bantuan yang masih mengandalkan data tahun 2010.

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nduga yang memiliki IPM terendah di Indonesia sebesar 34,10 dengan 63,61 persen keluarga berada dalam kategori prasejahtera menunjukkan bahwa pendekatan implementasi kebijakan konvensional tidak cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang multidimensional ini. Penelitian ini menegaskan perlunya penerapan model implementasi kebijakan yang asimetris dan

adaptif yang mempertimbangkan kondisi objektif seperti keterpencilan geografis, keterbatasan sumber daya manusia masyarakat adat, dan tantangan keamanan yang unik. Rekomendasi utama meliputi perbaikan sistem validasi data penerima bantuan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penerapan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat Nduga.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat, yakni hanya berlangsung selama dua minggu di Kabupaten Nduga, sehingga peneliti tidak dapat mengamati seluruh aspek implementasi kebijakan secara mendalam dan berkelanjutan. Kedua, terdapat keterbatasan akses terhadap beberapa informan kunci akibat kondisi keamanan yang tidak stabil dan keterpencilan wilayah, sehingga beberapa data yang diharapkan tidak dapat diperoleh secara optimal. Ketiga, penelitian ini hanya melibatkan 12 informan dari berbagai kategori, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh dinamika dan perspektif masyarakat di Kabupaten Nduga. Selain itu, keterbatasan biaya penelitian juga mempengaruhi mobilitas peneliti di lapangan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yaitu mengkaji dampak jangka panjang implementasi kebijakan penanganan kemiskinan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Nduga, terutama dalam konteks keberlanjutan program dan perubahan indikator kemiskinan multidimensi. Selain itu, studi lebih mendalam tentang efektivitas model implementasi kebijakan asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat adat dapat menjadi area eksplorasi baru, mengingat pendekatan konvensional masih belum optimal dalam konteks daerah terpencil dengan tantangan keamanan dan geografis yang kompleks.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si. selaku pembimbing dalam penelitian ini, serta Dinas Sosial Kabupaten Nduga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A. (2018). Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. *AsiaPacific Journal of Public Policy*, 4(1), 72–89. <https://core.ac.uk/download/pdf/480551129.pdf>
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98–115. <https://core.ac.uk/download/pdf/327119856.pdf>
- Asri, V. (2019). Targeting of social transfers: Are India's poor older people left behind? *World Development*, 115, 46–63. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.001>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Nduga dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Nduga.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia: Maret 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Papua Pegunungan dalam angka 2023*. BPS Provinsi Papua Pegunungan.
- Fossati, D. (2016). Is Indonesian local government accountable to the poor? Evidence from health policy implementation. *Journal of East Asian Studies*, 16(3), 307–330. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.17>
- Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). Optimalisasi BUMDes sebagai strategi peningkatan perekonomian menekan kemiskinan di Kabupaten Puhwato. *Jurnal Registratie*, 4(2), 64–76. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2817>
- Hirai, H., & Hiyane, A. (2021). How can NGO interventions break the poverty trap? Evidence from at-risk youths in the Philippines. *Development in Practice*, 32(5), 610–623. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1863337>
- Jamil, B., Putri, F. A., Prasetyo, D., & Rahmah, A. (2021). Do effective public governance and gender (in)equality matter for poverty? *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*, 35(1), 158–174. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1889391>
- Jones, C. O. (1996). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis* (3rd ed.). Duxbury Press.
- Liu, W., & Lin, H. (2018). The policy of targeted elimination of poverty and its faulty implementation: Findings from County A of Guangdong Province. *Rural China*, 15(1), 157–186.
- Loi, N. T., Le, T. H., Pham, Q. T., & Tran, M. H. (2022). The impact of institutions on multidimensional poverty reduction in Vietnam. *Journal of Social Economics Research*, 9(2), 111–120. <https://doi.org/10.18488/35.v9i2.3133>
- Ma'ruf, M. M. (2022). Implementation of the poverty reduction acceleration policy in Karawang Regency, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/2715>
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pengentasan kemiskinan desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tsai, W. H., & Liao, X. (2020). Mobilizing cadre incentives in policy implementation: Poverty alleviation in a Chinese county. *China Information*, 34(1), 45–67. <https://www.sci-hub.ru/10.1177/0920203x19887787>